

URBANESIA

Sat Intelkam Polres Baubau Sambangi DPMD Buteng

HARIANTO - BUTENG.URBANESIA.ID

Feb 2, 2022 - 23:03



Sat Intelkam Polres Baubau Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUTON TENGAH - Personil Sat Intelkam Polres Baubau yang di pimpin Ketua Tim Aipda Muhammad Idul Fitri.K bersama anggota melaksanakan penggalangan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) ARMAN, S.Pd., Md untuk

mengetahui kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa, Rabu (02/02/2022).

DPMD dalam tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aipda Muh. Idul Fitri bersama tim menemukan jika DPMD Buteng sangat berperan terkait administrasi pemerintahan desa maupun terkait keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"terkait dana desa, DPMD juga telah melakukan pengawasan bersama inspektorat Buteng dan apabila ada hal-hal penyimpangan bahkan kami langsung melakukan turun kelapangan dan pihak inspektorat langsung melakukan audit," ungkapnya.

Lanjutnya, di tengah pandemi covid 19 berkaitan dengan anggaran baik anggaran kementerian bahkan anggaran APBD mengalami pemotongan untuk membantu pencegahan covid 19.

Ia juga menjelaskan terkait penyaluran dana desa telah sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

"dalam penerimaan Bantuan langsung Tunai (BLT) DD ada ketentuan atau standar layak dan standar tidak layak bagi penerima," jelasnya.

Kata dia ini sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 besaran bantuan yang diterima masyarakat Rp. [300.000](#) per orang.

Aipda Muh. Idul Fitri. K kemudian menghimbau kepada DPMD untuk meningkatkan fungsi pengawasan dengan banyaknya bantuan agar tidak terjadi duplikasi atau ganda dalam penerimaan bantuan.